

Dinilai Membuat Masalah, Caretaker Kadin Papua Menuai Sorotan dari Berbagai Elemen

Tony Rosyid - INDONESIASATU.CO.ID

Apr 23, 2021 - 21:52



Jayapura Papua - Beberapa Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Papua yakni ketua Kadin Kabupaten Kepulauan Yapen, Nabire dan Dogiyai tegas mengoroti Pengurus KADIN Pusat agar Aksi Krateker Kadin Papua, Ronald Antonio yang sedang melantik pengurus KADIN di beberapa Kabupaten di Papua dihentikan.

Ketua KADIN Kabupaten Kepulauan Yapen Peter Logito mengatakan, pihaknya kaget dengan adanya Informasi Ketua Kadin baru Kabupaten Kepulauan Yapen yang digelar di Biak.

"Apa yang dilakukan di Biak itu sudah menjatuhkan Marwa KADIN dan membuat gaduh dan masalah baru di dalam tubuh KADIN karena, mereka tidak hormati pengurus definitif pusat," jelasnya melalui sambungan seluler Selasa, (20/4).

Pengurus Kadin Kabupaten Kepulauan Yapen ini menanyakan soal pelantikan yang dilakukan di Biak belum lama ini. Menurutnya, dalam pelantikan itu tidak dihadirkan Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen, ini tidak sah. Karena tidak sesuai AD ART Kadin Papua.

"Sekarang mereka bikin lagi di Biak dan Pemda Yapen tidak hadir saat pelantikan di Biak, ini sudah jelas bahwa proses pelantikan ini tidak sah," tegasnya.

Sementara itu, Monalisa Yoweni Haluk Ketua Kadin Kabupaten Nabire yang mengalami hal serupa, keputusan keputusan tanpa sebab ini sangat tidak profesional dan merugikan dirinya yang ada di daerah, Karena tidak sesuai tugas dan tanggungjawab jabatan karateker melantik Ketua Kadin.

"Seharusnya karateker bertugas melanjutkan tugas dan menggelar Musyawarah tapi, sengaja membuat Konflik dengan memberhentikan kami di Kabupaten maka, kami minta Pusat segera meninjau kembali krateker itu, menurut kami Karateker itu adalah karateker tidak sah, "kesalnya.

Frans Magai Ketua Kadin Kabupaten Dogiyai juga menambahkan, "jika melakukan pergantian ketua, pihaknya akan duduk di Kadin Papua, karena mereka yang dilantik pengurus sah bukan krateker sekarang.

"Kami akan melakukan pemalangan kadin Provinsi Papua, minta kembali apa yang sudah di tetap oleh pengurus kadin lama, ini sudah jelas dalam surat Nomor: 02 / DP / IV / 2021, itu tanda bukti palsu, dan tidak ada cap KADIN,"

Lanjut Magai, "Pergantian Kadin yang tidak sesuai dengan prosedur ini, akan membuat marah pengurus lama, dan ini bisa membuat Konflik di daerah. Mohon KADIN Pusat Harus lihat hal ini, jangan tunjuk Krateker sembarang seperti Ronald Antonio yang bikin masalah baru di Papua dengan ganti pengurus kabupaten semauanya, ini bisa terjadi masalah horisontal, "katanya. (Merah / AW)